



13 CLIMATE
ACTION



STRATEGIC PAPER

Katalis Perubahan: Peta Jalan Strategis Filantropi untuk Aksi Iklim Indonesia



TIM PENYUSUN

Tim Penulis

Prof. Jatna Supriatna M.Sc., Ph.D.
Dr. Doddy Sukadri
Iwan Wijayanto

Tim Pengulas

Rizal Algamar
Gusman Yahya
Dinda Sonaloka Asghar

Ucapan Terima Kasih

Belantara Foundation, PILI-Green Network, Tahija Foundation, Widya Erti Indonesia, Yayasan Bakti Barito, Yayasan Guru Belajar, Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, Yayasan Kita Bisa

Desain Cover dan Tata Letak

Izzulhaq Mahardika
Stella Angelica

Diterbitkan oleh:

Perhimpunan Filantropi Indonesia
Jakarta, 2025
Jl. Angkasa No. 55, Jakarta Pusat, 10720
E-mail: info@filantropi.or.id
Telp. (021) 6287234

Dilarang menggandakan atau menyebarkan sebagian maupun seluruh isi tulisan ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit, dalam bentuk apa pun, termasuk cetak, digital, maupun media lainnya.

Kata Pengantar

Isu iklim adalah tantangan strategis paling mendesak abad ini. Bukan hanya karena cakupannya yang lintas sektor dan lintas batas geografis, tetapi karena dampaknya meresap ke setiap lapisan kehidupan, dari ketahanan pangan hingga stabilitas ekonomi, dari kesehatan masyarakat hingga masa depan generasi mendatang. Di tengah kompleksitas dan urgensi tersebut, peran filantropi tidak lagi cukup bila sekadar respons jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah pendekatan yang lebih strategis dan disinilah filantropi menemukan peran terpentingnya sebagai katalisator penyesuaian/adaptasi sistemik. Bukan untuk menggantikan negara, melainkan untuk mengisi ruang strategis yang belum tersentuh seperti mendorong inovasi, menjembatani pemangku kepentingan lintas sektor, serta membangun landasan data dan pengetahuan yang kuat untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan.



Franciscus Welirang

Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Filantropi Indonesia

Pemanasan global berdampak luas, tidak hanya pada ekosistem tetapi juga pada kesehatan manusia. Indonesia, sebagai negara kepulauan tropis dengan hutan hujan tropis terbesar ketiga dan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki peran strategis dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Langkah-langkah mitigasi mencakup pengembangan perdagangan karbon, ekonomi hijau dan biru, transisi energi terbarukan, dekarbonisasi, serta pemanfaatan teknologi terbaru seperti hidrogen dan nuklir guna mempercepat pencapaian *Net Zero Emission*. Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) memiliki tanggung jawab untuk mengkaji dan mendorong pemahaman atas berbagai *trade-off* dalam penggunaan lahan, pemanfaatan keanekaragaman hayati, dampak perubahan iklim, serta kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam seperti hutan, laut, dan bentang alam lainnya. Karena itu, PFI juga berperan dalam memperkuat kemitraan pembangunan melalui pemberdayaan dan sinergi antar aktor termasuk sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil, serta menjembatani pengetahuan lokal di tingkat tapak dengan inovasi ilmiah yang dikembangkan oleh kalangan akademisi dan lembaga riset.



Prof. Jatna Supriatna M.Sc., Ph.D.

Anggota Dewan Pakar Perhimpunan Filantropi Indonesia dan
Founder Pusat Perubahan Iklim Universitas Indonesia

Dalam *Indonesia Philanthropy Outlook 2024* yang telah kami publikasikan, sektor Iklim & Lingkungan Hidup menempati posisi keempat sebagai program prioritas utama dari berbagai lembaga filantropi di seluruh Indonesia. Ini adalah sinyal positif, sebuah indikasi bahwa kesadaran dan komitmen terhadap isu krisis iklim semakin tumbuh dalam ekosistem filantropi nasional. Namun, kesadaran saja belum cukup. Tantangan perubahan iklim bersifat kompleks dan lintas sektor, sehingga tidak bisa dihadapi secara parsial. Diperlukan kolaborasi, ko-kreasi solusi, dan komitmen jangka panjang antar pemangku kepentingan untuk menciptakan dampak yang sistemik.

Publikasi ini sendiri lahir dari semangat gotong royong, hasil kerja bersama yang mencerminkan kolaborasi dan ko-kreasi. Kami berharap dokumen ini tidak berhenti sebagai referensi, melainkan menjadi pemantik lahirnya lebih banyak inisiatif kolaboratif serta ruang belajar lintas sektor yang dapat mempercepat transisi menuju masa depan Indonesia yang tangguh terhadap iklim.



Rizal Algamar

Ketua Badan Pengurus Perhimpunan Filantropi Indonesia

Daftar Isi

iii	Kata Pengantar
iv	Daftar Isi
01	Ringkasan Eksekutif
02	Pendahuluan
03	Analisis Situasi
13	Peran Strategis PFI
16	Rekomendasi Strategis
19	Kesimpulan
20	Apresiasi & Penghargaan
22	Referensi
23	Lampiran

Ringkasan Eksekutif

Indonesia menghadapi tantangan ganda yang mendesak: dampak perubahan iklim yang semakin nyata dan isu pembangunan berkelanjutan. Sebagai negara kepulauan, kerentanan terhadap kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan pada sektor vital seperti pertanian dan perikanan telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan.

Dampak ini, yang terukur melalui potensi kerugian PDB hingga 4,4% pada tahun 2050 dan ancaman terhadap jutaan lapangan kerja, diperparah oleh tantangan sistemik seperti fragmentasi kebijakan dan keterbatasan kapasitas di tingkat lokal.

Dokumen strategi ini mengusulkan peran baru bagi komunitas Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI): bukan sebagai penyandang dana utama yang menggantikan peran pemerintah, melainkan sebagai **katalisator perubahan sistemik**. Menyadari bahwa sumber daya PFI terbatas, kekuatan terbesarnya terletak pada kemampuannya untuk menjadi

gesit, berani mengambil risiko, dan membangun jembatan antar pemangku kepentingan. Untuk itu, PFI direkomendasikan untuk mengemban tiga peran kunci: sebagai **Pengurang Risiko** (*De-risker*) dengan mendanai inovasi percontohan, sebagai **Penghubung** (*Convener*) yang memfasilitasi dialog lintas sektor, dan sebagai **Pendukung Kebijakan Berbasis Bukti** (*Evidence-Builder*) yang mendanai riset independen.

Untuk mengimplementasikan peran tersebut, strategi ini merekomendasikan tiga pilar aksi kolektif yang harus difasilitasi oleh PFI Indonesia. Pilar pertama adalah membangun narasi dan visi bersama untuk menyatukan arah. Pilar kedua adalah mengambil peran katalitik dalam eksekusi melalui pembentukan mekanisme pendanaan kolaboratif, platform pembelajaran, dan investasi pada peningkatan kapasitas ekosistem. Pilar ketiga adalah menerapkan kerangka pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (ME&L) yang kuat untuk memastikan akuntabilitas dan adaptasi. Melalui pendekatan terstruktur ini, komunitas PFI dapat secara efektif memobilisasi sumber daya, pengetahuan, dan jaringan untuk memberikan kontribusi yang terukur demi masa depan Indonesia yang berketahanan dan berkelanjutan.





Pendahuluan

Latar Belakang: Urgensi Krisis Iklim dan Pembangunan di Indonesia

Urgensi penanganan perubahan iklim tidak dapat dibiarkan. Dampaknya sudah dirasakan di seluruh Indonesia, tidak hanya mengancam lingkungan tetapi juga pencapaian pembangunan yang telah susah payah diraih bangsa ini. Meningkatnya permukaan air laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan gangguan pada pertanian serta sumber daya air menimbulkan resiko yang signifikan terhadap berbagai segi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Tantangan-tantangan ini terkait erat dengan pembangunan berkelanjutan, karena perubahan iklim memperburuk ketimpangan yang ada dan menghambat kemajuan menuju pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan akses ke layanan publik lainnya. Di tengah tantangan ini, terdapat momentum dan kesadaran yang tumbuh dikalangan filantropi untuk mengambil peran yang lebih strategis dalam membantu pemerintah karena pemerintah tidak mungkin dapat mengatasinya sendiri. Momentum

ini tercermin dalam *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*, yang menempatkan isu Iklim & Lingkungan Hidup sebagai salah satu dari lima program prioritas utama lembaga filantropi. Berada di posisi ke-empat, ini menunjukkan adanya fondasi kesadaran yang kuat serta peluang besar bagi komunitas filantropi untuk secara kolektif mengangkat isu ini menjadi fokus sentral, sejalan dengan skala urgensi krisis yang dihadapi.

Tujuan dan Ruang Lingkup Dokumen Strategis

Dokumen strategi ini bertujuan untuk menyediakan kerangka analisis dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi komunitas Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) di Indonesia untuk memaksimalkan perannya dalam mengatasi isu perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Dokumen ini akan menguraikan analisis situasi, merumuskan peran strategis PFI sebagai katalis perubahan, dan menyajikan rekomendasi konkret yang terfokus pada aksi kolektif, inovasi pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi.

Analisis Situasi

Perubahan Iklim dalam Perspektif Global

Perubahan iklim memiliki paling tidak tiga karakteristik. Pertama adalah *'borderless issue'*, artinya bahwa perubahan iklim bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa mengenal batas benua, batas negara dan batas provinsi/kabupaten/kota. Dampak perubahan iklim bisa terjadi akibat ulah manusia yang mungkin diluar batas administrasinya. Lebih dari 90% bencana iklim yang terjadi di berbagai belahan dunia merupakan *'anthropogenic emission'* atau berbagai aktivitas manusia yang menimbulkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Yang kedua adalah *'long-time span issue'* yang berarti bahwa rangkaian proses perubahan iklim dan dampaknya sedang dan sudah terjadi dalam kurun waktu yang lama. Bukan hanya lima atau sepuluh tahun, tetapi sampai 50 dan bahkan lebih dari 100 tahun. Perlu diingat bahwa perubahan iklim terjadi sejak jaman revolusi industri pada abad 18 sampai sekarang. Itulah sebabnya PBB mengadopsi Konvensi Perubahan Iklim yang disebut dengan *United Nations Convention on Climate Change* (UNFCCC) pada tahun 1992 dan disahkan tahun 1994. Kemudian 197 negara yang meratifikasinya melakukan pertemuan puncak tahunan yang disebut *Conference of the Parties* (COP).

Yang ketiga adalah bahwa perubahan itu adalah *'science-based arguments'*. Artinya bahwa kejadian-kejadian pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, hilangnya biodiversitas, dsb telah diteliti dan dianalisa sejak lama. Tahun 1988 PBB mendirikan *Inter-governmental Panel on Climate Change* (IPCC) yang tugas utamanya menganalisa dampak perubahan iklim dan proyeksinya di masa depan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Lebih dari 2500 peneliti di seluruh dunia bergabung dalam IPCC dan secara reguler setiap enam sampai tujuh tahun sekali mengeluarkan laporan resminya untuk semua negara anggota UNFCCC.

Penyebab Terbesar Isu Perubahan Iklim di Indonesia

Perubahan iklim telah menjadi isu krusial yang dampaknya semakin nyata dirasakan di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang dan keanekaragaman hayati yang melimpah, Indonesia berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Akar dari permasalahan ini bersifat multifaset, namun secara garis besar didorong oleh tingginya emisi gas rumah kaca (GRK) yang berasal dari berbagai sektor kunci di dalam negeri.

Penyebab utama isu perubahan iklim di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa sektor utama, yaitu:



Sektor Kehutanan dan Perubahan Tata Guna Lahan (LULUCF): Paru-paru Dunia yang Terluka

Ironisnya, sektor yang seharusnya menjadi solusi justru menjadi kontributor terbesar emisi GRK Indonesia. Deforestasi dan degradasi hutan, terutama yang terjadi di lahan gambut, menjadi biang keladi utama. Alih fungsi hutan untuk perkebunan skala besar, terutama kelapa sawit, serta praktik pembalakan liar dan perambahan hutan secara signifikan mengurangi kemampuan hutan dalam menyerap karbon dioksida (CO₂).

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang seringkali disengaja untuk pembukaan lahan, memperparah kondisi ini. Kebakaran di lahan gambut melepaskan jumlah karbon yang masif ke atmosfer, menjadikan Indonesia sebagai salah satu emiter terbesar dari sektor ini secara global. Asap dari karhutla tidak hanya berdampak pada kesehatan dan ekonomi, tetapi juga secara langsung mempercepat laju pemanasan global.



Sektor Energi dan Industri: Ketergantungan pada "Emas Hitam"

Sektor energi merupakan penyumbang emisi GRK terbesar kedua dan terus menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Ketergantungan Indonesia yang tinggi pada bahan bakar fosil, khususnya batu bara, untuk pembangkit listrik menjadi sumber emisi utama. Pembakaran batu bara melepaskan CO₂ dalam jumlah besar ke atmosfer.

Sejalan dengan itu, kegiatan industri juga turut andil secara signifikan. Industri-industri padat energi seperti semen, baja, tekstil, dan petrokimia menghasilkan emisi GRK yang besar, baik dari penggunaan energi maupun dari proses produksinya

sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang pesat seringkali belum diimbangi dengan transisi ke teknologi industri yang lebih bersih dan ramah lingkungan.



Sektor Pertanian: Pangan dan Emisi Metana

Sektor pertanian, meskipun vital bagi ketahanan pangan nasional, juga berkontribusi terhadap emisi GRK, terutama dalam bentuk gas metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O). Praktik pertanian padi sawah yang tergenang air secara terus-menerus menciptakan kondisi anaerobik yang ideal bagi mikroba untuk menghasilkan gas metana.

Selain itu, sektor peternakan juga menjadi sumber emisi metana yang signifikan. Proses pencernaan pada hewan ternak, terutama sapi, menghasilkan metana yang dilepaskan ke atmosfer. Penggunaan pupuk nitrogen dalam praktik pertanian juga melepaskan dinitrogen oksida, gas rumah kaca yang memiliki potensi pemanasan global jauh lebih kuat daripada CO₂.



Sektor Limbah: Gunung Sampah yang Terus Bertumbuh

Pengelolaan limbah yang belum optimal di banyak wilayah di Indonesia turut menyumbang emisi GRK. Penumpukan sampah organik di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dalam kondisi anaerobik (tanpa oksigen) akan menghasilkan gas metana. Semakin besar volume sampah yang dihasilkan dan tidak dikelola dengan baik, semakin besar pula kontribusinya terhadap perubahan iklim.

Secara keseluruhan, isu perubahan iklim di Indonesia adalah cerminan dari model pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan energi fosil. Upaya mitigasi yang serius dan terstruktur di semua sektor ini menjadi kunci untuk menekan laju perubahan iklim dan melindungi masa depan Indonesia dari dampak yang lebih buruk.

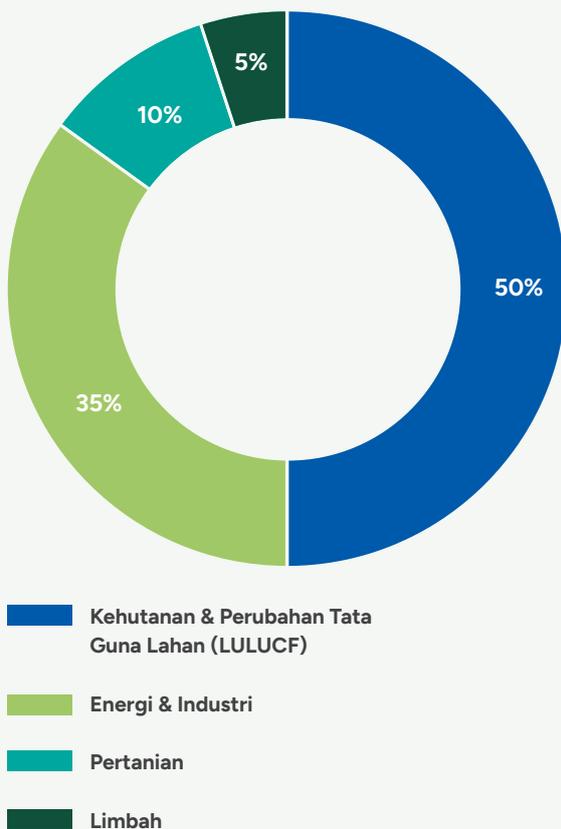
Dampak Perubahan Iklim di Indonesia

Kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim memerlukan tindakan mendesak dan komprehensif, yang berakar pada realitas geografisnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini menghadapi interaksi tantangan yang kompleks dan saling memperkuat, di mana dampak iklim tidak terjadi secara terisolasi melainkan menciptakan efek berantai yang mengancam stabilitas sosial-ekonomi. Kenaikan permukaan air laut, misalnya, bukan lagi sekadar proyeksi jangka panjang, melainkan ancaman nyata yang telah menyebabkan abrasi

parah, banjir rob yang semakin sering dan luas, serta intrusi air asin yang merusak lahan pertanian pesisir dan mencemari sumber air tawar bagi jutaan penduduk. Infrastruktur vital seperti pelabuhan, jalan, dan pemukiman di kota-kota pesisir utama berada dalam risiko konstan, menuntut biaya adaptasi yang sangat besar. Pada saat yang sama, frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem mulai dari banjir bandang dan tanah longsor pada musim hujan hingga kekeringan parah pada musim kemarau, telah mengacaukan pola musim yang selama ini menjadi panduan bagi aktivitas ekonomi.

Penyebab Utama Emisi GRK

Tingginya emisi gas rumah kaca (GRK) di Indonesia didorong oleh beberapa sektor kunci. Deforestasi dan ketergantungan pada energi fosil menjadi tantangan terbesar yang harus diatasi.



Dampak perubahan iklim bukan lagi proyeksi, melainkan realitas yang mengancam stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, dan hajat hidup jutaan masyarakat Indonesia.



Potensi Kerugian 4,4% PDB

Diproyeksikan pada tahun 2050 jika tanpa aksi mitigasi yang kuat.



10,4 Juta Jiwa Terancam

Akibat kenaikan permukaan air laut di wilayah pesisir pada 2030.



Hasil Panen Padi Turun 10%

Ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional akibat kenaikan suhu.



Tangkapan Ikan Berkurang 20,3%

Diproyeksikan pada 2050 akibat kenaikan suhu permukaan laut.

Gambar 1. Realita Isu Perubahan Iklim di Indonesia.

Signifikansi dampak ini terasa paling signifikan di sektor pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi kerakyatan. Sektor ini tidak hanya menyerap sekitar 28,64% dari total tenaga kerja nasional (BPS, Feb 2024) tetapi juga berkontribusi sebesar 12,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional (BPS, 2023). Gangguan pada sektor pertanian memiliki implikasi yang luas dan mendalam. Fenomena El Niño, sebagai contoh, telah berulang kali menyebabkan gagal panen massal, terutama pada komoditas padi, yang secara langsung mengancam ketahanan pangan nasional. Bagi jutaan petani kecil, kegagalan panen berarti kehilangan satu-satunya sumber pendapatan, yang mendorong mereka lebih jauh ke dalam jurang kemiskinan dan memperburuk ketidaksetaraan. Dengan demikian, perubahan

iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan telah menjadi isu fundamental pembangunan yang berisiko menganulir kemajuan yang telah dicapai dan mengancam pencapaian target pembangunan berkelanjutan di masa depan.

Risiko Iklim di Indonesia: Data dan Dampak Rinci

Perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata yang dampaknya terukur bagi stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Kombinasi dari kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi, dan gangguan pada sektor vital seperti pertanian dan sumber daya air menciptakan risiko yang saling terkait dan semakin besar.



Meningkatnya Permukaan Air Laut: Ancaman bagi Wilayah Pesisir

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut. Data menunjukkan ancaman ini bukan lagi sekadar proyeksi, melainkan realitas yang sedang berlangsung.

Tabel 1. Dampak Peningkatan Permukaan Air Laut.

Indikator	Data	Sumber
Laju Kenaikan Rata-rata	4,3 ± 0,4 mm per tahun	Laporan BMKG (Data Satelit hingga 2024)
Ancaman Populasi	10,4 juta jiwa diperkirakan terancam pada tahun 2030.	Betahita.id (mengutip laporan Climate Central)
Potensi Kerugian Ekonomi	US\$ 3,3 miliar per tahun (sekitar Rp 51 triliun) jika kenaikan mencapai 47 cm.	Laporan Indonesia Cerah & Koaksi Indonesia (2022)
Potensi Kerugian Ekstrem	Kerugian dapat mencapai US\$ 10,3 miliar (sekitar Rp 160 triliun) jika kenaikan mencapai 1,75 meter.	Jaring Nusa (2024)

Dampak Nyata di Lapangan:



Abrasi dan Banjir Rob

Wilayah pesisir, terutama di Pantai Utara (PANTURA) Jawa seperti Semarang, Demak, dan Subang, secara rutin mengalami banjir rob yang merusak infrastruktur, perumahan, dan lahan tambak.



Intrusi Air Laut

Di Kepulauan Seribu dan banyak wilayah pesisir lainnya, air laut telah meresap ke dalam akuifer air tanah. Hal ini menyebabkan sumur-sumur warga menjadi payau, memicu krisis air bersih dan memaksa penduduk bergantung pada air hujan atau membeli air.



Salinisasi Lahan Pertanian

Lahan sawah di dekat garis pantai menjadi tidak produktif karena tingginya kadar garam dalam tanah, memaksa petani untuk beralih profesi atau mengalami gagal panen.

Peristiwa Cuaca Ekstrem: Bencana Hidrometeorologi yang Merusak

BMKG secara konsisten melaporkan peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca ekstrem di Indonesia. Dampaknya tidak hanya dirasakan sesaat tetapi menimbulkan kerugian ekonomi jangka panjang.

Tabel 2. Dampak Bencana Hidrometeorologi.

Indikator	Data	Sumber
Frekuensi Bencana	Bencana hidrometeorologi (banjir, angin puting beliung, tanah longsor) mendominasi lebih dari 90% total bencana di Indonesia.	BNPB
Kerugian Ekonomi Regional	Kerugian ekonomi akibat bencana alam di Asia Pasifik mencapai US\$ 65 miliar (sekitar Rp 1.000 triliun) pada tahun 2023, dengan banjir sebagai penyebab utama.	Laporan Aon (2024)

Dampak Nyata di Lapangan:



Banjir Skala Besar

Peristiwa seperti banjir besar di Kalimantan Selatan (2021) dan banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (2021) menyebabkan ribuan orang mengungsi, merusak infrastruktur publik, dan melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal selama berminggu-minggu.



Kekeringan Ekstrem

Fenomena El Niño secara historis menyebabkan kekeringan parah, memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta gagal panen massal, seperti yang terjadi pada tahun 2015 dan 2019, dan berdampak pada produksi pangan di 2023.

Gangguan pada Pertanian dan Sumber Daya Air: Mengancam Ketahanan Pangan dan Ekonomi

Sektor pertanian dan ketersediaan air bersih adalah fondasi kehidupan dan ekonomi, namun keduanya sangat sensitif terhadap perubahan iklim.

Tabel 3. Dampak Perubahan Iklim pada Sektor Pertanian dan Sumber Daya Air.

Indikator	Data	Sumber
Potensi Penurunan Hasil Padi	Kenaikan suhu dapat menurunkan hasil panen padi hingga 10%.	Kumparan (2025)
Peningkatan Kebutuhan Air	Kekeringan akibat perubahan iklim diproyeksikan meningkatkan permintaan air hingga 52,1% pada tahun 2050.	G20 Climate Risk Atlas
Potensi Penurunan Tangkapan Ikan	Kenaikan suhu permukaan laut dapat mengurangi potensi tangkapan ikan hingga 20,3% pada tahun 2050.	G20 Climate Risk Atlas

Dampak Nyata di Lapangan:



Pergeseran Musim Tanam

Pola hujan yang tidak menentu membuat petani kesulitan menentukan waktu tanam yang optimal, meningkatkan risiko gagal panen.



Krisis Ketersediaan Air

BMKG dan BRIN telah menyoroti bahwa perubahan iklim mengancam ketersediaan air, baik karena kekeringan yang memperpanjang musim kemarau maupun curah hujan ekstrem yang menyebabkan air langsung terbuang sebagai aliran permukaan (banjir) tanpa sempat tersimpan.

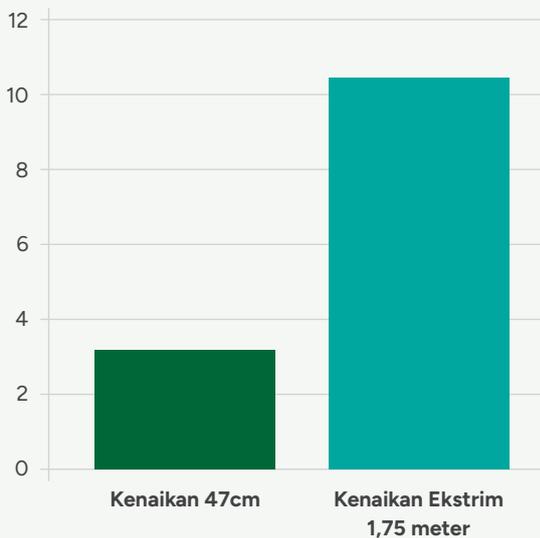
Risiko Makro Ekonomi bagi Indonesia

Analisis Mendalam: Risiko dan Dampak Terukur

Dari kerugian ekonomi hingga krisis lingkungan, dampak perubahan iklim telah menjadi ancaman nyata bagi stabilitas sosial-ekonomi Indonesia.

Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Kenaikan Permukaan Laut

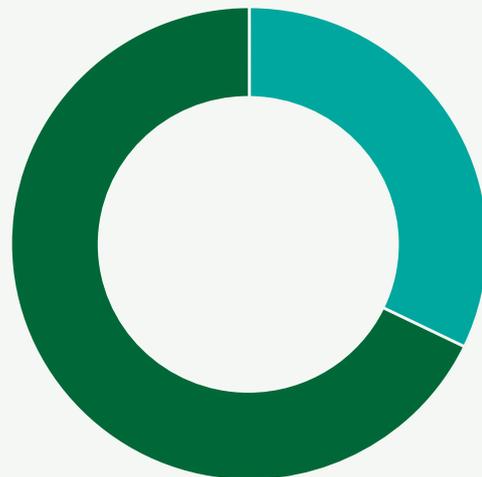
Proyeksi kerugian tahunan akibat kenaikan muka air laut menunjukkan ancaman finansial signifikan.



■ Potensi Kerugian per Tahun (Miliar US\$)

Krisis Sampah Plastik Nasional

Mayoritas sampah plastik tahunan tidak terkelola, dengan ratusan ribu ton bocor ke laut.



■ Terkelola (Diatur Ulang/TPA)

■ Tidak Terkelola (Bocor ke Lingkungan)

Gambar 2. Potensi Kerugian Ekonomi dan Krisis Sampah.

Secara keseluruhan, berbagai risiko fisik dan transisi yang telah diuraikan berakumulasi menjadi ancaman signifikan dan terukur terhadap fondasi ekonomi makro Indonesia, terutama terhadap PDB dan stabilitas fiskal negara. Dampak ini bukan lagi sekadar proyeksi hipotesis, melainkan sebuah keniscayaan ekonomi yang menuntut pertimbangan serius dalam setiap perencanaan pembangunan nasional.

Proyeksi kerugian ekonomi menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan. Dalam skenario business-as-usual dengan emisi tinggi dan tanpa aksi mitigasi yang kuat, Indonesia berisiko kehilangan **4,4%** dari potensi PDB-nya pada tahun 2050. Angka ini setara dengan ratusan triliun rupiah pendapatan nasional yang hilang setiap tahunnya dana yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kerugian ini akan semakin parah seiring berjalannya waktu, dengan proyeksi meningkat drastis hingga **13,27%** pada tahun 2100. Kehilangan sebesar ini dapat secara efektif menganulir dekade pertumbuhan ekonomi, menghambat upaya pengentasan kemiskinan, dan berpotensi menurunkan peringkat kredit negara, yang akan membuat biaya pinjaman menjadi lebih mahal.

Lebih jauh, risiko iklim menciptakan tekanan ganda pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan dipaksa untuk mengalokasikan dana darurat yang semakin besar untuk penanggulangan bencana, perbaikan infrastruktur yang rusak, dan penyediaan

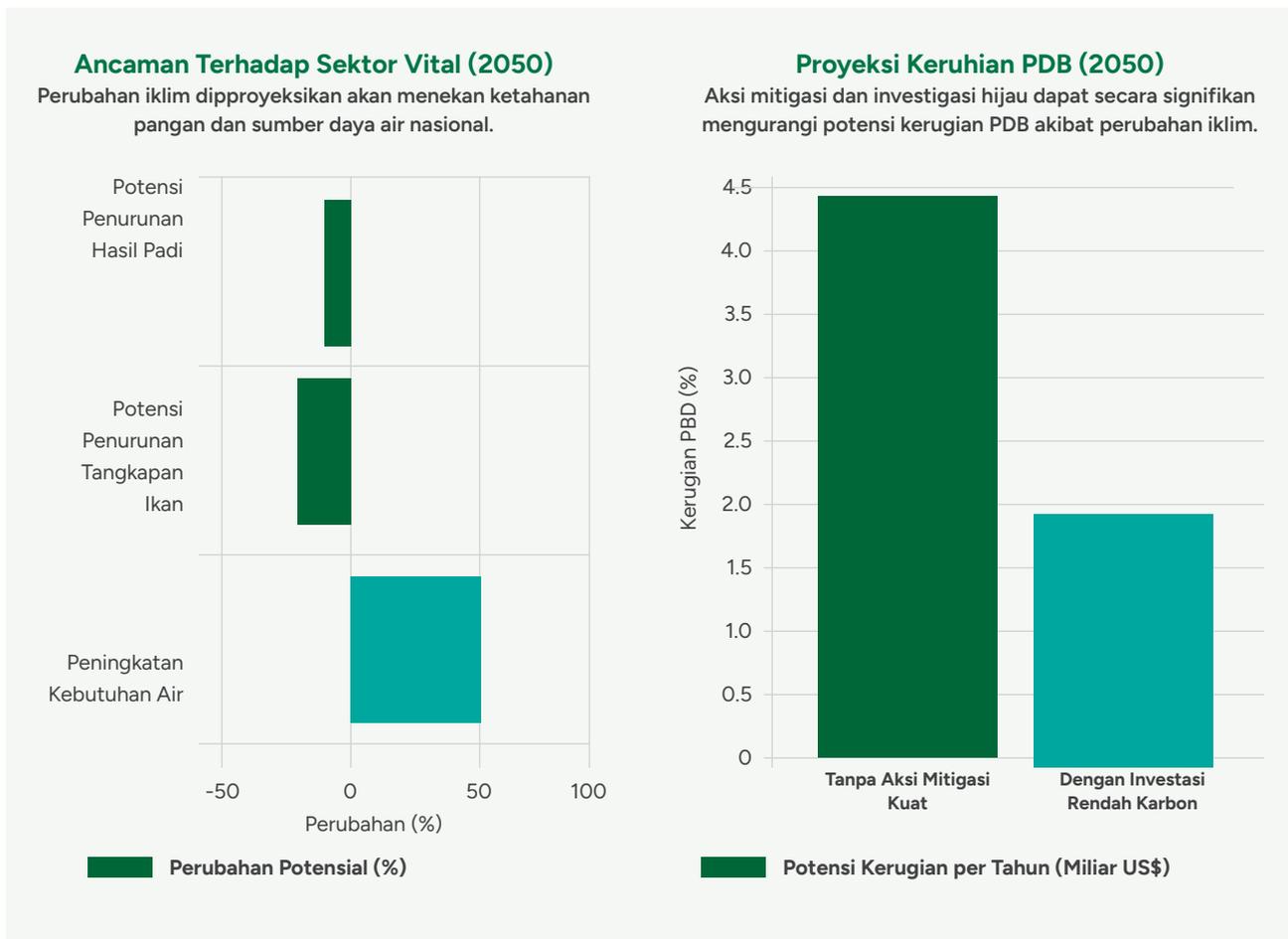
jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak. Sementara itu, dari sisi pendapatan, produktivitas sektor-sektor kunci seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata yang menurun akan menyebabkan penerimaan pajak yang lebih rendah. Celah fiskal yang melebar ini akan membatasi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi dalam program-program pembangunan jangka panjang.

Namun, data yang sama juga secara tegas menyoroti adanya peluang strategis. Dengan investasi yang terarah pada ekonomi rendah karbon, efisiensi energi, dan adaptasi yang terencana, potensi kerugian PDB pada tahun 2050 dapat ditekan secara signifikan menjadi **2%**. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun biaya transisi tidak dapat dihindari, investasi pada keberlanjutan adalah pilihan yang jauh lebih unggul secara ekonomi dibandingkan biaya kelambanan (*cost of inaction*). Hal ini menggarisbawahi urgensi transisi menuju model pembangunan yang berketahanan iklim, bukan hanya sebagai agenda lingkungan, tetapi sebagai strategi fundamental untuk menjaga kesehatan fiskal, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi makro Indonesia di masa depan.

Data ini menegaskan bahwa perubahan iklim bukan lagi isu lingkungan semata, melainkan telah menjadi isu fundamental bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang memerlukan tindakan adaptasi dan mitigasi yang terukur dan segera.



Sumber: Tahija Foundation



Gambar 3. Ancaman Sektor Kunci & Proyeksi Kerugian PDB 2050.

Tantangan dalam menerapkan langkah-langkah keberlanjutan di Indonesia bersifat sistemik, mengakar dalam, dan memengaruhi setiap aktor dengan cara yang berbeda, menciptakan sebuah lanskap yang kompleks dan sulit dinavigasi. Di tingkat pemerintah, tantangan utama adalah kegagalan koordinasi yang kronis antar kementerian dan lembaga. Isu iklim yang bersifat lintas sektor seringkali jatuh di antara celah-celah yurisdiksi, di mana setiap kementerian bekerja dalam "silo" mereka sendiri, menghasilkan kebijakan yang tumpang tindih, tidak selaras, atau bahkan kontradiktif. Hal ini diperparah oleh kesenjangan antara kebijakan di tingkat nasional dengan penegakan hukum di lapangan, serta alokasi sumber daya yang seringkali tidak memadai untuk isu iklim yang dianggap sebagai masalah jangka panjang dibandingkan dengan prioritas politik jangka pendek.

Di saat yang sama, masyarakat lokal dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yang berada di garis terdepan dalam menghadapi dampak perubahan iklim, masih menghadapi tantangan besar terkait kapasitas teknis maupun dukungan finansial. Meskipun memiliki pengetahuan lokal yang berharga, mereka seringkali tidak memiliki sumber daya untuk mengimplementasikan solusi adaptasi atau mitigasi dalam skala yang berarti, serta memiliki pengaruh politik yang terbatas untuk menyuarakan kebutuhan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Fokus utama mereka, yang dapat dimengerti, adalah pada kelangsungan hidup jangka pendek, yang terkadang membuat keberlanjutan jangka panjang menjadi prioritas sekunder. Pada intinya, tantangan inti yang melumpuhkan kemajuan adalah tidak adanya mekanisme yang efektif dan terpusat untuk mengkoordinasikan upaya semua aktor ini.

Akibatnya, tindakan yang ada menjadi sangat terfragmentasi, menghasilkan kebijakan *top-down* yang tidak efektif karena tidak sesuai dengan realitas di lapangan, sementara inisiatif komunitas yang inovatif tetap terisolasi dan gagal direplikasi untuk menciptakan perubahan sistemik yang diperlukan.

Di tengah lanskap tantangan yang kompleks, terdapat serangkaian peluang strategis yang signifikan di mana PFI dapat memainkan peran katalitik yang unik dan menentukan. Peluang-peluang ini muncul dari pergeseran paradigma baik di tingkat nasional maupun global, menciptakan momentum yang dapat dimanfaatkan untuk mengakselerasi aksi iklim. Pertama, **memanfaatkan momentum kebijakan** yang ada saat ini sangat krusial. Komitmen kuat pemerintah Indonesia melalui target *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang semakin ambisius, rencana *FOLU Net Sink 2030*, dan skema *Just Energy Transition Partnership* (JETP) menciptakan kerangka kebijakan yang jelas. Namun, kerangka ini membutuhkan dukungan implementasi yang kuat di lapangan, sebuah celah di mana PFI dapat masuk untuk mendanai proyek percontohan, membangun kapasitas lokal, dan memastikan transisi yang adil.

Kedua, terdapat peluang besar untuk **mengkatalisasi pertumbuhan ekonomi hijau dan biru**. Peningkatan permintaan global dan domestik untuk produk berkelanjutan, seperti kopi bersertifikat atau

produk perikanan yang ditangkap secara lestari, membuka pasar baru. Potensi ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah, pengembangan ekowisata berbasis komunitas, dan partisipasi dalam pasar karbon sukarela merupakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang dapat menciptakan lapangan kerja sekaligus melestarikan lingkungan. PFI dapat berperan sebagai investor awal untuk model-model bisnis ini.

Ketiga, PFI dapat **mempercepat adopsi inovasi dan teknologi**. Biaya energi terbarukan seperti panel surya terus menurun, menjadikannya solusi yang semakin terjangkau untuk elektrifikasi pedesaan. Kemajuan teknologi digital, seperti aplikasi untuk pertanian presisi atau sistem peringatan dini bencana berbasis seluler, menawarkan solusi yang lebih efektif dan terukur untuk mitigasi dan adaptasi. PFI dapat mendukung riset, pengembangan, dan penyebaran teknologi ini ke komunitas yang paling membutuhkan. Terakhir, peluang untuk **membangun kolaborasi lintas sektor** semakin terbuka lebar. Meningkatnya kesadaran dan minat sektor swasta pada praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST/ESG) membuka pintu bagi kemitraan strategis antara perusahaan, OMS, dan pemerintah. PFI, dengan posisinya yang netral, dapat bertindak sebagai fasilitator tepercaya untuk merancang dan mengelola kemitraan ini, memastikan bahwa sumber daya dari berbagai pihak dapat disinergikan untuk mencapai dampak yang lebih besar.

Menavigasi Lanskap: Tantangan vs. Peluang

Memahami tantangan sistemik adalah kunci untuk mengidentifikasi di mana filantropi dapat menciptakan peluang strategis.

Tantangan Sistemik

- ❌ Kegagalan Koordinasi: Silo antar kementerian dan lembaga menghambat kebijakan yang terintegrasi.
- ❌ Keterbatasan Kapasitas: OMS dan masyarakat lokal kekurangan kapasitas teknis dan finansial.
- ❌ Fragmentasi Upaya: Inisiatif yang terisolasi gagal menciptakan perubahan sistemik.

Peluang Strategis

- ✅ Momentum Kebijakan: Target NDC, FOLU Net Sink 2030, dan JETP menciptakan kerangka yang jelas.
- ✅ Ekonomi Hijau/Biru: Permintaan produk berkelanjutan, ekonomi sirkular, dan pasar karbon sedang tumbuh.
- ✅ Kolaborasi Lintas Sektor: Minat sektor swasta pada praktik ESG membuka pintu kemitraan baru.

Gambar 4. Tantangan dan Peluang Filantropi.



Peran Strategis PFI

Visi: PFI sebagai Katalis Perubahan Sistemik

Menghadapi skala tantangan iklim dan pembangunan yang begitu besar, komunitas PFI harus secara jujur mengakui batasannya sekaligus secara cerdas memanfaatkan kekuatannya. PFI tidak bisa dan tidak boleh mencoba menggantikan peran pemerintah atau pasar. Sumber daya finansial kolektifnya, meskipun signifikan, hanyalah setetes air di lautan jika dibandingkan dengan anggaran negara atau aliran modal swasta. Mencoba bersaing dalam pendanaan langsung adalah strategi yang pasti gagal. Oleh karena itu, peran paling strategis dan berdampak tinggi bagi PFI bukanlah menjadi penyandang dana utama, melainkan menjadi **katalis utama perubahan**. Visi ini menuntut pergeseran paradigma: dari sekadar menulis cek untuk proyek-proyek yang terisolasi, menjadi penggunaan sumber daya yang terbatas secara strategis untuk membuka, mempengaruhi, dan mengarahkan aliran modal yang jauh lebih besar dari pemerintah dan sektor swasta.

Kekuatan unik PFI tidak terletak pada dana yang digelontorkan, melainkan pada atributnya yang lain: kemampuannya untuk menjadi **gesit** dalam merespons kebutuhan, keberaniannya untuk **mengambil risiko** dengan mendanai inovasi yang belum terbukti dan dianggap terlalu berisiko oleh

investor konvensional, serta posisinya yang netral untuk **membangun jembatan** kepercayaan di antara aktor-aktor yang seringkali tidak dapat atau tidak mau bekerja sama. Dengan menjadi katalis, PFI dapat menciptakan efek domino, di mana investasi awal yang relatif kecil dapat membuktikan sebuah konsep, mengurangi risiko, dan pada akhirnya menarik investasi skala besar yang mampu menciptakan perubahan sistemik.

Peran Kunci PFI

Untuk menerjemahkan visi PFI sebagai katalis perubahan ke dalam tindakan nyata, komunitas PFI perlu secara sadar mengemban peran-peran strategis yang spesifik. Peran-peran ini dirancang untuk secara langsung menjawab tantangan sistemik yang ada dan memanfaatkan peluang yang terbuka. Tiga peran kunci yang paling krusial adalah sebagai Katalisator Inovasi dan Pengurang Risiko (*The Derisker*), Penghubung dan Pembangun Jembatan (*The Convener*), dan Pendukung Kebijakan Berbasis Bukti (*The Evidence-Builder*).

Katalisator Inovasi dan Pengurang Risiko (*The Derisker*)

Peran ini memanfaatkan keunggulan utama PFI: kemampuannya untuk menggunakan *patient capital* yang tidak terbebani oleh tuntutan pengembalian



finansial jangka pendek. Sebagai *de-risker*, PFI secara proaktif mendanai proyek-proyek percontohan, eksperimen, dan model bisnis inovatif yang berpotensi memberikan solusi iklim yang signifikan namun masih dianggap terlalu berisiko oleh investor komersial atau terlalu baru untuk diadopsi oleh pemerintah. Dengan menyediakan pendanaan awal (hibah, pinjaman lunak, atau investasi ekuitas), PFI berfungsi sebagai batu loncatan, membuktikan kelayakan teknis dan ekonomi dari sebuah solusi.

Setelah model tersebut terbukti berhasil dan berkelanjutan, ia menjadi aman dan menarik bagi pendanaan skala besar dari lembaga keuangan, investor swasta, atau untuk direplikasi dalam kebijakan pemerintah. Contohnya, sebuah yayasan dapat memberikan hibah awal untuk pengembangan pembangkit listrik biomassa skala desa yang memanfaatkan limbah pertanian. Proyek percontohan ini tidak hanya menyediakan energi bersih bagi komunitas, tetapi juga menciptakan data operasional dan model finansial yang solid. Keberhasilan ini kemudian dapat digunakan untuk menarik pendanaan komersial dari lembaga seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau bank pembangunan untuk mereplikasi model tersebut di ratusan desa lainnya, menciptakan dampak yang jauh melampaui investasi awal PFI.

Penghubung dan Pembangun Jembatan (*The Convener*)

Dalam menghadapi tantangan utama seperti fragmentasi dan belum menguatkan koordinasi, peran PFI sebagai *convener*, yang mampu menyatukan berbagai pemangku kepentingan, menjadi semakin krusial. Dengan memanfaatkan posisinya yang netral dan terpercaya, PFI memiliki potensi untuk menciptakan serta memfasilitasi platform dialog yang aman dan konstruktif bagi berbagai pemangku kepentingan. Melalui ruang ini, aktor-aktor yang selama ini jarang berinteraksi atau bahkan memiliki ketegangan kepentingan dari beragam latar belakang dapat duduk bersama untuk saling berbagi perspektif, membangun pemahaman bersama, dan merumuskan solusi kolektif atas permasalahan yang kompleks. PFI tidak hanya menyediakan tempat, tetapi juga dapat mendanai proses fasilitasi profesional, riset bersama, dan kegiatan pembangunan konsensus. Peran ini secara langsung menjembatani silo dan membangun modal sosial yang diperlukan untuk aksi kolektif.

Sebagai contoh, dalam konflik pemanfaatan lahan hutan, lembaga filantropi dapat memfasilitasi serangkaian negosiasi antara perusahaan perkebunan, perwakilan masyarakat adat, dan pemerintah daerah. Melalui dialog yang terstruktur,

mereka dapat mencapai kesepakatan pengelolaan hutan lestari yang inovatif, yang mungkin tidak akan pernah tercapai jika hanya mengandalkan pendekatan regulasi dari atas ke bawah. Hasilnya adalah konservasi yang efektif, penghidupan masyarakat yang terjamin, dan kepastian usaha bagi perusahaan.

Pendukung Kebijakan Berbasis Bukti (*The Evidence-Builder*)

Perubahan kebijakan yang transformatif jarang terjadi dalam ruang hampa. Hal tersebut membutuhkan argumen yang solid, data yang kuat, dan analisis yang kredibel. Dalam peran sebagai *evidence-builder*, PFI berinvestasi dalam penciptaan pengetahuan dan bukti yang diperlukan untuk mendorong reformasi kebijakan yang efektif. Ini dilakukan dengan mendanai riset independen, analisis data, dan pemodelan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki keahlian, seperti *think tank*, universitas, dan organisasi riset masyarakat sipil. Dengan mendukung produksi bukti yang objektif

dan berkualitas tinggi, PFI membantu memastikan bahwa perdebatan kebijakan tidak didasarkan pada opini atau kepentingan semata, tetapi pada fakta dan analisis yang mendalam. Bukti ini kemudian dapat digunakan oleh para advokat, masyarakat sipil, dan bahkan oleh para pembuat kebijakan itu sendiri untuk merancang peraturan yang lebih efektif dan berpijak pada realitas lapangan.

Contoh konkretnya, sebuah gerakan kolektif yang dimobilisasi oleh PFI dapat mendanai analisis komprehensif dari lembaga riset independen mengenai mengenai manfaat ekonomi dan potensi penciptaan lapangan kerja dari Rancangan Undang-Undang Energi Terbarukan. Hasil riset ini, yang disajikan dalam format yang mudah diakses, kemudian digunakan sebagai materi advokasi utama dalam audiensi dengan anggota parlemen dan kementerian terkait, yang pada akhirnya membantu mempercepat lahirnya undang-undang yang lebih kuat dan berpihak pada transisi energi.



Gambar 5. Kerangka Peran Baru Filantropi.



Rekomendasi Strategis

Untuk memaksimalkan dampak kolektif, komunitas lembaga filantropi yang difasilitasi oleh PFI, direkomendasikan untuk mengambil langkah-langkah strategis yang terfokus pada tiga pilar utama. Pilar-pilar ini dirancang untuk membangun fondasi, mengkatalisasi aksi, dan memastikan akuntabilitas, menciptakan sebuah siklus aksi kolektif yang berkelanjutan dan berbasis bukti.

Pilar 1: Membangun Narasi dan Visi Bersama

Langkah pertama dan paling fundamental untuk mengatasi fragmentasi adalah menyatukan suara dan arah gerak. Tanpa narasi dan tujuan bersama (*shared goals*), upaya PFI akan tetap terpecah-belah, tidak efisien, dan kurang berdampak. Pilar ini berfokus pada pembangunan fondasi sosial dan intelektual untuk aksi kolektif.

Merumuskan Agenda Bersama

Ini adalah inti dari pilar pertama. PFI direkomendasikan untuk memfasilitasi sebuah proses partisipatif yang melibatkan para anggotanya, pakar iklim, perwakilan pemerintah, dan OMS untuk merumuskan 2-3 prioritas iklim strategis yang akan menjadi fokus bersama komunitas PFI untuk 3-5 tahun ke depan. Proses ini harus transparan dan inklusif, memastikan bahwa prioritas yang dipilih tidak hanya relevan secara ilmiah tetapi juga selaras dengan prioritas

pembangunan nasional dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Hasilnya harus berupa dokumen agenda yang jelas dan ringkas yang dapat menjadi panduan bagi seluruh anggota dalam merancang program dan alokasi sumber daya mereka.

Menguatkan Narasi dengan Data

Sebuah narasi yang kuat harus didukung oleh data yang kredibel. PFI direkomendasikan untuk secara kolektif menginisiasi, mendanai, dan mempublikasikan riset unggulan secara berkala, misalnya melalui sebuah laporan tahunan bertajuk "*Laporan PFI untuk Iklim Indonesia*". Laporan ini akan berfungsi sebagai acuan utama yang memetakan aliran dana filantropi untuk isu iklim, mengidentifikasi kesenjangan pendanaan (geografis dan tematik), menyoroti praktik-praktik terbaik, dan mengukur kemajuan terhadap tujuan bersama. Laporan ini tidak hanya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor filantropi itu sendiri, tetapi juga akan menjadi alat advokasi yang kuat untuk menunjukkan komitmen dan dampak PFI kepada pemerintah dan publik.

Kampanye Publik Terkoordinasi

Untuk membangun dukungan publik yang lebih luas, komunitas PFI perlu secara aktif membentuk persepsi publik. Direkomendasikan untuk meluncurkan kampanye kesadaran publik yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Kampanye ini harus bertujuan untuk

mengubah persepsi aksi iklim dari sekadar beban biaya menjadi sebuah peluang ekonomi hijau yang dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan inovasi, dan membangun masa depan yang lebih sejahtera. Dengan menggunakan narasi yang positif dan menampilkan kisah-kisah sukses dari proyek-proyek yang didukung oleh PFI dan para anggotanya, kampanye ini dapat menginspirasi lebih banyak individu, perusahaan, dan bahkan pembuat kebijakan untuk bergabung dalam gerakan aksi iklim.

Pilar 2: Mengambil Peran Katalitik dalam Eksekusi

Setelah visi bersama ditetapkan melalui Pilar 1, komunitas PFI harus segera beralih ke mode eksekusi yang kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada dampak. Pilar ini adalah mesin dari strategi, di mana niat baik diubah menjadi tindakan nyata di lapangan. Fokusnya adalah menciptakan infrastruktur dan mekanisme yang memungkinkan anggota untuk bekerja sama secara efektif dan efisien.

Membentuk Mekanisme Pendanaan Kolaboratif

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya individual dan meningkatkan skala dampak, sangat direkomendasikan untuk membentuk "Dana Iklim" (*Climate Fund*) yang terdedikasi. Mekanisme ini akan berfungsi sebagai wadah pendanaan bersama di mana anggota dapat menyalurkan sebagian sumber dayanya. Dana ini akan dikelola secara profesional dengan tata kelola yang transparan untuk mendanai proyek-proyek inovatif yang selaras dengan agenda bersama yang telah ditetapkan. Lebih dari sekadar hibah, dana ini harus dirancang untuk menawarkan skema keuangan campuran (*blended finance*), di mana dana PFI digunakan untuk menarik investasi yang lebih besar dari sektor swasta atau lembaga keuangan pembangunan. Misalnya, dana ini dapat memberikan jaminan risiko pertama (*first-loss guarantee*) untuk pinjaman energi terbarukan atau berinvestasi dalam obligasi hijau.

Memfasilitasi Platform Kolaborasi & Pembelajaran

Pengetahuan adalah sumber daya yang sama pentingnya dengan uang. PFI Indonesia direkomendasikan untuk menciptakan dan memfasilitasi platform kolaborasi dan pembelajaran yang dinamis. Upaya ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2018 melalui Klaster Filantropi

Lingkungan Hidup & Konservasi, namun masih perlu diperkuat untuk menjangkau isu-isu strategis lainnya dan mendorong partisipasi yang lebih luas. Bentuknya dapat berupa kelompok kerja (*working group*) tematik yang berfokus pada isu-isu prioritas (misalnya, pertanian berkelanjutan atau pengelolaan sampah), di mana anggota dapat secara rutin berbagi pengetahuan teknis, tantangan di lapangan, dan praktik terbaik. Selain itu, sebuah forum tahunan atau pertemuan puncak dapat diselenggarakan untuk memamerkan kemajuan, merancang proyek bersama, dan memperkuat jaringan antar anggota dan dengan pemangku kepentingan lainnya. Platform ini akan menjadi jantung dari komunitas praktik (*community of practice*) yang terus belajar dan beradaptasi.

Berinvestasi pada Peningkatan Kapasitas Ekosistem

Solusi iklim yang paling efektif seringkali datang dari tingkat akar rumput. Namun, OMS lokal dan organisasi berbasis komunitas seringkali menjadi pihak yang paling kekurangan sumber daya. Oleh karena itu, sebagian dari upaya kolektif PFI perlu dialokasikan secara strategis untuk memperkuat kapasitas ekosistem ini. Dukungan tersebut tidak hanya terbatas pada pendanaan proyek, tetapi juga mencakup investasi dalam penguatan kapasitas inti organisasi seperti pelatihan manajemen keuangan, pengembangan keterampilan advokasi, dukungan untuk pemantauan dan pelaporan dampak, serta akses ke jaringan dan teknologi. Dengan memperkuat aktor-aktor di garis depan ini, PFI tidak hanya membiayai solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi bagi keberlanjutan dan ketahanan jangka panjang.

Pilar 3: Menerapkan Pemantauan, Evaluasi, dan Pembelajaran (ME&L)

Untuk memastikan bahwa upaya kolektif tidak hanya berjalan tetapi juga berhasil dan terus membaik, pilar ketiga ini menjadi krusial. Tanpa kerangka kerja pemantauan, evaluasi, dan pembelajaran (ME&L) yang kuat, komunitas PFI berisiko mengulangi kesalahan, membuang sumber daya, dan gagal mencapai potensi dampak maksimalnya. Pilar ini berfungsi sebagai sistem saraf pusat dari seluruh strategi, mengubah data menjadi wawasan dan wawasan menjadi tindakan yang lebih baik.

Mengembangkan Kerangka ME&L Bersama

Langkah pertama adalah beralih dari pengukuran dampak proyek individual ke pengukuran kemajuan kolektif. Ini membutuhkan pengembangan kerangka ME&L yang terstandarisasi dan disepakati bersama. Kerangka ini harus secara langsung terkait dengan tujuan bersama yang ditetapkan di Pilar 1, lengkap dengan serangkaian Indikator Kinerja Utama (KPI) yang jelas, sederhana, dan relevan. KPI ini harus mencakup berbagai tingkatan dampak, mulai dari output (misalnya, jumlah petani yang dilatih teknik pertanian tahan iklim), *outcome* (misalnya, peningkatan hasil panen atau penurunan emisi dari sektor tertentu), hingga dampak sistemik (misalnya, adopsi kebijakan baru di tingkat daerah). Proses pengembangan kerangka ini harus bersifat partisipatif untuk memastikan relevansi dan kemudahan implementasi bagi semua anggota.

Membangun Sistem Pelaporan Kolektif

Sebuah kerangka kerja bersama hanya akan efektif jika didukung oleh sistem yang mampu mengumpulkan dan menganalisis data secara efisien. Direkomendasikan untuk membangun sebuah sistem pelaporan kolektif, idealnya berbasis platform digital, di mana setiap anggota dapat secara berkala memasukkan data kemajuan mereka sesuai dengan kerangka ME&L yang telah disepakati. Sistem ini

akan mengagregasi data dari berbagai proyek dan organisasi, memungkinkan komunitas PFI untuk pertama kalinya melihat gambaran besar dari dampak kolektif mereka. Data agregat ini akan menjadi tulang punggung dari "Laporan PFI untuk Iklim Indonesia", memberikan akuntabilitas yang transparan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya, serta menjadi alat advokasi yang ampuh.

Menjadikan Evaluasi sebagai Proses Pembelajaran

Ini adalah pergeseran budaya yang paling penting yang melihat ME&L bukan sebagai alat untuk menghakimi, melainkan sebagai mesin pembelajaran. Temuan dari evaluasi, baik keberhasilan maupun kegagalan, harus dianalisis secara mendalam untuk memahami mengapa sebuah intervensi berhasil atau tidak. Wawasan ini kemudian harus dibagikan secara terbuka melalui platform kolaborasi Klaster Filantropi Lingkungan Hidup & Konservasi untuk mendorong pembelajaran bersama. Siklus ini menciptakan sebuah mekanisme umpan balik yang kuat untuk manajemen adaptif, di mana strategi kolektif dapat disesuaikan, prioritas dapat diperbaiki, dan sumber daya dapat dialokasikan kembali secara berkala berdasarkan bukti nyata dari lapangan, bukan asumsi. Dengan demikian, seluruh komunitas PFI menjadi lebih cerdas, lebih gesit, dan pada akhirnya, lebih efektif.

Cetak Biru Aksi: Tiga Pilar Strategis

Rekomendasi strategis difokuskan pada tiga pilar utama untuk memaksimalkan dampak kolektif komunitas filantropi.



Pilar 1: Visi Bersama

Menyatukan suara dan arah gerak dengan merumuskan agenda prioritas bersama.



Pilar 2: Eksekusi Katalitik

Membentuk mekanisme pendanaan kolaboratif dan platform berbagi pengetahuan.



Pilar 3: ME&L

Mengembangkan kerangka Pemantauan, Evaluasi, & Pembelajaran untuk melacak kemajuan.

Gambar 6. Tiga Pilar Strategis untuk Memaksimalkan Dampak Filantropi.

Kesimpulan

Urgensi penanganan perubahan iklim di Indonesia menuntut respons yang melampaui sekadar pendanaan proyek-proyek yang terfragmentasi. Dibutuhkan intervensi strategis yang dirancang untuk mendorong perubahan sistemik.

Dokumen ini telah menguraikan bagaimana lanskap risiko yang kompleks, mulai dari ancaman fisik terhadap masyarakat pesisir hingga risiko makroekonomi yang signifikan, berkelindan dengan tantangan sistemik seperti fragmentasi kebijakan dan keterbatasan kapasitas lokal. Dalam konteks inilah komunitas PFI menemukan panggilannya yang paling strategis. Dengan menyadari keterbatasan sumber daya yang dimiliki, PFI perlu bertransformasi dari sekadar penyandang dana menjadi katalisator perubahan yang efektif dan transformatif.

Dengan secara sadar mengemban peran sebagai inisiator inovasi yang berani mengambil risiko (*de-risker*), penghubung yang menjembatani silo antar pemangku kepentingan (*convener*), dan pendukung advokasi berbasis bukti (*evidence-builder*), PFI dapat secara efektif memanfaatkan momentum kebijakan nasional dan potensi ekonomi hijau yang sedang tumbuh. Tiga pilar rekomendasi, yaitu Membangun Visi Bersama, Mengambil Peran Katalitik dalam Eksekusi, dan Menerapkan ME&L, menyediakan peta jalan yang koheren untuk aksi kolektif. Ini adalah panggilan bagi seluruh anggota PFI dan para mitranya untuk melampaui zona nyaman, berkolaborasi secara radikal dengan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, serta secara cerdas memobilisasi sumber daya, pengetahuan, dan jaringan. Dengan berinvestasi dalam solusi iklim yang sistemik dan berkelanjutan, komunitas PFI tidak hanya akan memberikan kontribusi yang terukur, tetapi juga membantu membentuk masa depan Indonesia yang lebih berketahanan, adil, dan sejahtera.



Waktunya Beraksi Adalah Sekarang

Ini adalah panggilan bagi seluruh anggota Perhimpunan Filantropi Indonesia untuk berkolaborasi, memobilisasi sumber daya, dan berinvestasi secara cerdas dalam solusi iklim demi mewujudkan masa depan Indonesia yang berketahanan dan berkelanjutan.

Apresiasi & Penghargaan

Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI) menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota atas kontribusinya dalam penyusunan publikasi ini.

Ucapan terima kasih dan apresiasi khusus kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan *strategic paper* dengan judul *Katalis Perubahan: Peta Jalan Strategis Filantropi untuk Aksi Iklim Indonesia*.



Belantara Foundation adalah organisasi non-profit yang berbasis di Indonesia yang bekerja untuk melindungi lanskap Indonesia dengan membangun proyek-proyek keberlanjutan lokal di daerah-daerah yang disisihkan untuk konservasi, restorasi, dan penguatan masyarakat di sekitar hutan yang berkelanjutan. Diluncurkan pada saat COP 21 UNFCCC di Paris (Desember 2015), Belantara Foundation didirikan oleh dan menerima pendanaan awal dari APP Group. Sumber daya keuangan tambahan sedang digalang dari sektor publik dan swasta. Fokus utama Belantara adalah mendukung restorasi, perlindungan, konservasi spesies yang terancam punah (khususnya harimau sumatra, gajah sumatra, serta orangutan sumatra dan orangutan kalimantan), pengembangan kelembagaan, serta inisiatif pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi, hutan produksi, hutan lindung, dan perhutanan sosial di sepuluh wilayah pada lima provinsi di Pulau Sumatra dan Kalimantan.



PILI Green Network adalah lembaga swadaya masyarakat yang berkomitmen pada pelestarian lingkungan dan konservasi alam. Sebagai jaringan informasi dan kolaborasi, PILI berfokus pada isu keanekaragaman hayati, perlindungan sumber daya alam, dan lingkungan hidup secara luas. PILI juga menyediakan berbagai layanan pendukung, seperti publikasi, kampanye, dukungan riset, serta fasilitasi inisiatif konservasi. Dengan visi mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil di Indonesia, PILI berupaya membangun kemitraan strategis, memperkuat kapasitas para pemangku kepentingan, dan mendorong inovasi dalam rantai pasok produk berbasis komunitas.



Yayasan Tahija adalah organisasi nirlaba dengan Visi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik melalui kemitraan berkelanjutan di bidang pendidikan, budaya, kesehatan, pelestarian lingkungan, dan layanan sosial.

Pada tahun 2017 hingga 2023, bekerja sama dengan Monash University/WMP Global dan Universitas Gadjah Mada, Yayasan Tahija melalui World Mosquito Program (WMP) Yogyakarta, melakukan sebuah uji coba secara acak terkontrol yang membuktikan efektivitas metode Wolbachia dalam menurunkan kasus demam berdarah hingga 77% dan angka rawat inap hingga 86%. Proyek ini telah diserahkan secara resmi kepada pemerintah Indonesia, yang kini mengimplementasikan program percontohan di lima kota: Semarang, Bandung, Jakarta Barat, Bontang, dan Kupang.



Widya Erti Indonesia (WEI) adalah sebuah yayasan yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan dan marginal melalui pengembangan pendidikan, sosial, dan ekonomi. WEI berfokus pada kehidupan masyarakat pedesaan dan telah memberikan kontribusi pada berbagai komunitas di beberapa lokasi di Indonesia, seperti Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Tengah, dan Barat, Sumba, dan Sulawesi Selatan. WEI bekerja berdasarkan potensi dan kebutuhan komunitas lokal melalui cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan program-programnya, WEI didukung oleh personel yang berpengalaman di bidang pertanian, lingkungan, kehutanan, pendidikan, ekonomi, pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.



Sumber: pexels.com



Didirikan pada tahun 2011, Yayasan Bakti Barito adalah lembaga filantropi dari Barito Pacific Group, sebuah perusahaan energi terintegrasi yang terdiri dari berbagai entitas seperti Chandra Asri Group, Barito Renewables (*sub-holding company* untuk Star Energy Geothermal), Griya Idola, Petrindo Jaya Kreasi, Petrosea, dan banyak lagi. Dipandu oleh komitmen abadi para pendiri kami, Prajogo Pangestu dan istrinya Harlina Tjandinegara, yayasan ini berdedikasi untuk mengatasi tantangan lingkungan dan pendidikan di Indonesia melalui inisiatif kolaboratif dengan para mitra dan masyarakat yang kami layani.



Yayasan Guru Belajar merupakan philanthropic intermediary yang bergerak dengan visi ekosistem guru yang menemukan, merefleksikan, dan menyebarkan solusi atas masalah-masalah dunia yang relevan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai dan berkelanjutan. Kami memiliki misi memberdayakan guru menjadi pemimpin kolektif perubahan melalui 4 kunci pengembangan guru: kemerdekaan, kompetensi, kolaborasi dan karier. Kami telah menjangkau lebih dari 787.000 guru, menerbitkan 2.600 Praktik Baik Guru Belajar dan memberdayakan ratusan daerah kolaborator. Program kami Temu Pendidik Nusantara telah diakui secara global sebagai *Top 10 Finalis UNESCO Hamdan Prize for Teacher Development*.



humanis

Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (Humanis) adalah organisasi nirlaba yang berbasis di Jakarta dan bekerja untuk wilayah Asia Tenggara. Humanis bekerja dengan kelompok marginal dan masyarakat paling terdampak untuk memastikan setiap orang mendapatkan hak-hak dasarnya, membuat perubahan, memengaruhi kebijakan. Seperti namanya, Humanis membayangkan masyarakat yang adil dan berkelanjutan di Asia Tenggara, di mana setiap individu terlindungi haknya dan menghormati perbedaan satu sama lainnya. Untuk mencapai ini, Humanis bekerja dalam tiga area dampak, yaitu: *Gender Equality, Diversity, and Inclusion (GEDI)*, *Civic Rights in the Digital Age (CRIDA)*, dan *Climate Justice*.



Kitabisa.org adalah platform donasi digital terbesar di Indonesia yang kini berkembang menjadi solusi menyeluruh untuk pengelolaan dana filantropi. Sejak berdiri pada tahun 2013, Kitabisa telah menghimpun lebih dari Rp5 triliun, melibatkan 8+ juta donatur, dan bermitra dengan 500+ perusahaan untuk melaksanakan lebih dari 479.000 kampanye sosial di seluruh Indonesia. Inovasi utama kami adalah skema *blended financing*—yakni penggabungan berbagai sumber dana seperti donasi publik, dana CSR, hibah, anggaran pemerintah, dan dana berbasis keagamaan untuk menciptakan dampak sosial yang lebih besar dan berkelanjutan.

Referensi

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2022). *Rencana Operasional Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Republik Indonesia. (2022). *Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Republic of Indonesia*. Dokumen diserahkan kepada UNFCCC.
3. Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP). (2023). *Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) for the Indonesia Just Energy Transition Partnership*. Jakarta: Sekretariat JETP Indonesia.
4. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Berita Resmi Statistik: Keadaan Angkatan Kerja Indonesia Februari 2024*. No. 37/05/Th. XXVII, 6 Mei 2024. Jakarta: BPS.
5. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2023*. No. 13/02/Th. XXVII, 5 Februari 2024. Jakarta: BPS.
6. Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Luas Panen dan Produksi Padi di Indonesia 2023*. Jakarta: BPS.
7. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Laporan dan Peringatan Dini Iklim. Diakses secara berkala melalui situs resmi BMKG.
8. Perhimpunan Filantropi Indonesia. (2024). *Indonesia Philanthropy Outlook 2024*. Jakarta: PFI.
9. Institute for Essential Services Reform (IESR). (2023). *Indonesia Energy Transition Outlook*. Jakarta: IESR.
10. World Bank. (2021). *Indonesia's Climate Change Development Report*. Washington, D.C.: The World Bank.
11. Hassan, Z. (2014). *The Social Labs Revolution: A New Approach to Solving our Most Complex Challenges*. Berrett-Koehler Publishers.
12. Kania, J., & Kramer, M. (2011). *Collective Impact*. Stanford Social Innovation Review, Winter 2011.
13. Scharmer, C. O. (2016). *Theory U: Leading from the Future as It Emerges* (2nd ed.). Berrett-Koehler Publishers.

Lampiran

Peta Jalan Strategis 5 Tahun Filantropi Indonesia sebagai Katalis Aksi Iklim (2025-2030)

Fase 1: Tahun 1 (2025-2026) - Fondasi dan Mobilisasi

Fokus: Membangun infrastruktur kolaboratif, menyelaraskan pemahaman, dan memobilisasi komitmen awal dari anggota untuk meletakkan fondasi bagi aksi kolektif.

Pilar Strategis	Aktivitas Kunci	Hasil yang Diharapkan
1. Visi Bersama	<ul style="list-style-type: none">Menyelenggarakan serangkaian lokakarya strategis dengan anggota, pakar, dan pemerintah.Mengkommisikan studi dasar (baseline study) untuk "Laporan Filantropi untuk Iklim Indonesia".	<ul style="list-style-type: none">Terbitnya Dokumen Agenda Bersama yang merumuskan 2-3 prioritas strategis untuk 3-5 tahun ke depan.Tersedianya data awal mengenai aliran dana filantropi untuk iklim saat ini.
2. Eksekusi Katalitik	<ul style="list-style-type: none">Mendesain tata kelola, kriteria investasi, dan mekanisme operasional untuk "Dana Iklim" kolaboratif.Membentuk 1-2 Kelompok Kerja (<i>Working Group</i>) tematik awal di Kluster Filantropi Lingkungan Hidup & Konservasi (KFLHK) berdasarkan prioritas.	<ul style="list-style-type: none">Struktur hukum dan operasional "Dana Iklim" siap untuk diluncurkan.KFLHK lebih aktif berbagi pengetahuan dan memetakan peluang strategis.
3. ME&L	<ul style="list-style-type: none">Mengembangkan Kerangka ME&L Bersama yang terstandarisasi, lengkap dengan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang disepakati.	<ul style="list-style-type: none">Tersedianya Panduan ME&L Kolektif yang akan digunakan oleh semua proyek yang didanai melalui mekanisme bersama.

Fase 2: Tahun 2-3 (2026-2028) - Akselerasi dan Percontohan

Fokus: Meluncurkan mekanisme pendanaan, mendanai proyek-proyek percontohan inovatif, dan mengaktifkan platform kolaborasi untuk menghasilkan bukti awal dan pembelajaran.

Pilar Strategis	Aktivitas Kunci	Hasil yang Diharapkan
1. Visi Bersama	<ul style="list-style-type: none"> Meluncurkan kampanye publik awal untuk menyosialisasikan Agenda Bersama dan peran filantropi. Menerbitkan "Laporan Filantropi untuk Iklim Indonesia" edisi pertama. 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesadaran publik dan pemangku kepentingan mengenai komitmen filantropi. Sektor filantropi menjadi sumber data yang kredibel mengenai pendanaan iklim.
2. Eksekusi Katalitik	<ul style="list-style-type: none"> Meluncurkan dan mendanai putaran pertama proyek percontohan dari "Dana Iklim". Mengadakan Forum Kolaborasi tahunan pertama untuk berbagi pembelajaran. Meluncurkan program peningkatan kapasitas pertama untuk OMS mitra. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbiayainya 5-10 proyek percontohan inovatif di lapangan. Terbentuknya komunitas praktik (<i>community of practice</i>) yang aktif. Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial dari setidaknya 10-15 OMS lokal.
3. ME&L	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi sistem pelaporan kolektif berbasis digital. Melakukan evaluasi tahunan pertama terhadap kemajuan kolektif dan kinerja "Dana Iklim". 	<ul style="list-style-type: none"> Terkumpulnya data dampak kolektif dari putaran pertama proyek. Adanya Laporan Evaluasi Tahunan pertama yang berisi pembelajaran awal.

Fase 3: Tahun 4-5 (2028-2030) - Peningkatan Skala dan Pengaruh Sistemik

Fokus: Memanfaatkan bukti dan keberhasilan dari fase percontohan untuk meningkatkan skala dampak, memengaruhi kebijakan, dan memastikan keberlanjutan ekosistem kolaborasi.

Pilar Strategis	Aktivitas Kunci	Hasil yang Diharapkan
1. Visi Bersama	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan temuan dari laporan dan evaluasi untuk melakukan advokasi kebijakan yang terarah. Memulai proses untuk memperbarui Agenda Bersama untuk siklus strategis berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Dimulainya siklus perencanaan strategis kedua.
2. Eksekusi Katalitik	<ul style="list-style-type: none"> Secara aktif memfasilitasi kemitraan antara proyek percontohan yang berhasil dengan investor dampak, lembaga keuangan, atau pemerintah untuk peningkatan skala (<i>scaling up</i>). Mengembangkan skema <i>blended finance</i> yang lebih canggih berdasarkan pembelajaran. 	<ul style="list-style-type: none"> Setidaknya 2-3 model percontohan berhasil mendapatkan pendanaan lanjutan dari sumber non-filantropi. Terciptanya satu model <i>blended finance</i> yang dapat direplikasi.
3. ME&L	<ul style="list-style-type: none"> Mempublikasikan laporan dampak komprehensif yang merangkum hasil dan pembelajaran selama 3-5 tahun. Mengintegrasikan temuan evaluasi ke dalam kriteria pendanaan dan strategi siklus berikutnya. 	<ul style="list-style-type: none"> Terbitnya Laporan Dampak Jangka Menengah yang menunjukkan kontribusi katalitik filantropi. Terwujudnya budaya manajemen adaptif yang berbasis data di dalam komunitas.

STRATEGIC PAPER

Katalis Perubahan: Peta Jalan Strategis Filantropi untuk Aksi Iklim Indonesia



Jl. Angkasa No.55, RT.7/RW.5,

Jakarta Pusat, 10720

Telepon: (021) 6287234

E-mail: info@filantropi.or.id